

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- Ali, Ahmad Dkk. 2012. *Asas – Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir, Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok : Rajawali Pers.
- Artadi, I Ketut. 2008. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*. Denpasar: Pustaka Bali Post
- Abdur, Rahman I Doi. 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta : Srigunting PT. Raja Grafindo Persada)
- Candra, Mardi. 2021. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (e-reader Gramedia Digital : 12 Juli 2021)
- Dahwal, Sirman. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Dahwal, Sirman. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- Efendi, Jonaedi. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

- Fajar, Mukti dan Yulinato Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar.
- Pudja, Gede MA. 1975. *Pengantar tentang perkawinan menurut hukum hindu*, Jakarta: Maya Sari
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Judiasih, Sonny Dewi Dkk. 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kartono, Kartini. 2017 *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Made Metu Dahana, 2013, *Sistem Kawin Lari Adat Bali Lombok dan Filosofinya*, Surabaya : Paramita.
- Manan, Abdul.2006.*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.Jakarta: Kencana.
- Nasional, I. D. P. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.
- Pide, Suriyaman Masturi. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sirman, Dahwal. *Perbandingan Hukum Perkawinan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm 77.
- Tolib, Setiadi. 2013. *Hukum Adat Indonsia*. Afabeta: Jakarta, hlm.221
- Utomo, Laksanto. 2017. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang, 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widia, Wayan P dan I Ketut Sudantra. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Swasta Nulus.

Sumber Karya Ilmiah: Skripsi

Putrayasa, Komang. 2022. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Susi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr)*. Skripsi: Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Chintyauti, Livia Annisa. 2022. *Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi: Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Artikel Dalam Jurnal

Astuty, Siti Yuli. 2013. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei. Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Open Journal system “Welfare StatE” Vol. 2, No. 1 2013.

Anonim. 1991. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Dasar Hukum: (1) Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991; (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991*.

Dyatmikawati, P. (2011). *Perkawinan Pada Gelahang dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14).

Erwinsyahbana, T. (2012). *Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

Hafas, I. (2021). *Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Tahkim*, 4(1), 41-58.

- Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *QISTIE*, 5(1).
- Juniarta, I. M. (2013). Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Adat Bali Di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(2).
- Mulyadi, W., & Nugraheni, A. S. C. (2017). Akibat hukum penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Pacitan). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 69-76.
- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 300-317.
- RAHAYU, N. P. A. (2019). *Pelaksanaan Perkawinan Ngerorod Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Kecamatan Cakranegara)* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Ramadhita, R. (2014). Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan. *Journal de Jure*, 6(1).
- Rissita, M. (2021). *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).
- Rokhim, A., & Sirait, L. (2017). Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2), 105-130.
- Rosdiana, N. R., & Suprihatin, T. (2022). Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 21-26.
- Saidah, F. (2019). Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), 171-181.

- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Suardana, I. N., Martha, I. W., & Artatik, I. G. A. K. (2021). Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Instrumen Hukum Perkawinan Di Kabupaten Gianyar. *Hukum dan Kebudayaan*, 1(3 Mei), 43-55.
- Sudantra, I. K., & Laksana, I. G. N. D. (2019). Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 56-72.
- Syahbana, T. E. (2012). Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Ilmu Hukum*, 3(1), 5.
- Vijananda, I. G. D., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 22-34.
- Salamah, F. *IMPLEMENTASI PERMA NO. 5 TAHUN 2019 DALAM UPAYA MEMINIMALISIR TERJADINYA PERKAWINAN ANAK (Studi Di Pengadilan Agama Garut)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489)

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Sekretariat Negara. Jakarta.*

Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

